

Paradoks kriminalisasi korupsi: suatu ancaman penyelenggaraan pelayanan publik dalam sektor telekomunikasi

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20417333&lokasi=lokal>

Abstrak

[Patut dicatat bahwa sesuai definisinya telekomunikasi adalah sarana untuk berkomunikasi sehingga penyelenggaraan telekomunikasi sesungguhnya adalah misi negara untuk menjawab HAM setiap orang untuk berkomunikasi dan berinformasi tersebut. Jika kita mencermati kem.bali definisinya maka paradigma pengaturan dalam hukum telekomunikasi konvensional setidaknya akan melihat kepada dua hal, yakni (i) aspek aktivitas penyelenggaraan berkomunikasi yakni mencakup bagaimana pemancaran dan pengiriman informasi sampai dengan kegiatan penerimaan informasi, dan (U) aspek aktifitas penyelenggaraan sarannya. Sebagai bentuk pelayanan publik dimana pemerintah tidak melakukan investasi langsung dalam penyediaan sarana dan jaringannya, maka kepastian hukum untuk pengembalian investasi pelaku usaha tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Telekomunikasi. Tidak dapat ditampik bahwa pemaksaan kriminalisasi korupsi terhadap PKS Indosat dengan 1M2 berpotensi merusak kepastian hukum dan bisnis dalam industri telekomunikasi, selain itu secara langsung juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimana industri jasa telekomunikasi menjadi terancam pelayanannya untuk mengakomodasi HAM masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan berinformasi. The definition of telecommunications is a means to communicate so that the operation of telecommunications is truly a mission to answer the state of human rights of everyone to communicate and an informed proficiency level. If we look at re-definition of the paradigm of conventional telecommunications regulation in the law will at least look at two things, namely (i) aspects of the organization of communication activities that include how the transmission and delivery of information to the activities of receiving information, and (ii) aspects of the implementation activities sarannya. Sebagai form of public service in which the government does not invest directly in the provision of facilities and networks, the legal certainty of return on investment for entrepreneurs certainly should get legal protection Based on the Telecommunications Act. Can not be denied that the imposition of the criminalization of corruption against MCC Indosat 1M2 potentially damaging to the rule of law and businesses in the telecommunication industry, but it is also a direct violation of human rights which the telecommunications industry becomes threatened public services to accommodate human rights to be able to

communicate and an informed.]